

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan adalah salah satu isu penting dalam Hubungan Internasional yang menduduki posisi ketiga setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global.¹ Isu lingkungan menjadi sangat penting untuk dibahas dalam sebuah forum karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika terjadi suatu tragedi atau bencana di suatu wilayah negara maka akan berdampak pada negara tetangga. Salah satu diantara masalah lingkungan yang wajib dibahas ialah isu perubahan iklim. Untuk meminimalisir adanya dampak tersebut, dibutuhkan suatu hukum dan peraturan yang mengikat berbagai negara agar bersama-sama menanggulangi permasalahan perubahan iklim tersebut.

Isu perubahan iklim tersebut juga menjadi perdebatan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Semenjak tahun 1960-an, Amerika Serikat selalu menjadi pelopor dalam masalah lingkungan, memiliki komunitas peduli lingkungan yang inisiatif dan progresif.² Hal ini terjadi dari akhir tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1990-an³, ketiga presiden pada periode tersebut yaitu Ronald Reagan (1981-1989) dan George H.W Bush (1989-1993) berasal dari partai republik dan Bill Clinton (1993-2001) dari partai demokrat.

Publik Amerika Serikat mulai sadar akan isu perubahan iklim sejak musim panas pada tahun 1980-an dimana publik menganggap bahwa itu adalah musim terpanas dalam sejarah Amerika Serikat dan mereka menyadari bahwa efek rumah kaca sudah terdeteksi.⁴ Pada masa

¹ Gareth Porter and Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics*, (University of California : Westview Press, 1991) 324.

² Robert Falkner, "American Hegemony and the Global Environment", *International Studies Review* 7, (2005): 585.

³ Susanne Donner and Felix Faltin, "Klimapolitische Entwicklungen in den USA", *Initiativen auf bundesstaatlicher und regionaler Ebene - Info Brief - Deutscher Bundestag Wissenschaftliche Dienste*. Berlin, (2007)

⁴ Anthony Leiserowitz, "American Risk Perceptions: Is Climate Change Dangerous?", *Risk Analysis* vol.25 no.6, (2005): 1435.

pemerintahan George H. W. Bush, Amerika Serikat meratifikasi UNFCCC dan meratifikasi *Protokol Kyoto* pada pemerintahan Bill Clinton. Di masa Bill Clinton, isu perubahan iklim diprioritaskan. Bill Clinton bahkan menunjuk beberapa orang yang pakar pada isu lingkungan ke dalam pemerintahannya, seperti Timothy Wirth (Departemen Luar Negeri), Carole Browner sebagai kepala EPA (*Environmental Protection Agency*) dan Sherri Goodman (Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan Lingkungan).⁵

Pada akhir pemerintahan Bill Clinton, minat masyarakat pada isu lingkungan mulai memudar. Domestik Amerika Serikat mulai berubah karena komunitas bisnis menentang kebijakan lingkungan dan iklim.⁶ Namun situasi dan keadaan ini tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh Bill Clinton selaku kepala pemerintahan pada waktu itu.⁷ Lalu pada pemerintahan George W. Bush, hal di atas semakin memburuk. Seperti banyaknya anggota pemerintahan yang meragukan apakah perubahan iklim merupakan hal yang serius, bahkan mereka menganggap bahwa isu perubahan iklim adalah isu yang tidak terlalu mendesak dan ada beberapa isu lain yang lebih penting dibandingkan isu iklim.⁸

Selanjutnya pada masa pemerintahan Barack Obama yang berbanding terbalik dengan Bush sebelumnya dimana Barack Obama ingin membuat Amerika Serikat menjadi negara yang peduli akan permasalahan lingkungan termasuk iklim.⁹ Dengan terpilihnya Presiden Barack Obama pada tahun 2009, isu iklim kembali menjadi agenda utama politik dan setidaknya retorika terhadap isu-isu iklim berubah sepenuhnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Barack Obama: *“The United States will once again engage vigorously in these negotiations,*

⁵Paul G Harris, *International Environmental Affairs and U.S. Foreign Policy*, The environment, international relations, and U.S. foreign policy, Washington, D.C.: Georgetown University Press, (2001) 6.

⁶Robert Falkner, “American Hegemony and the Global Environment”, hal 590.

⁷Robert Falkner, “American Hegemony and the Global Environment”, hal 593.

⁸Antony Barnett, “Bush attacks environment ‘scare stories’”. *The Observer*, 4 April, (2004). <http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1185292,00.html> (Diakses pada 19 Maret 2019).

⁹Miodrag Soric, “Politik Iklim usulan Obama”, (2009). <https://www.dw.com/id/politik-iklim-usulan-obama/a-4714165> (Diakses pada 19 Maret 2019).

and help lead the world toward a new era of global cooperation on climate change".¹⁰ Dengan kata lain Amerika Serikat akan terlibat pada perjanjian iklim Paris dengan penuh semangat dalam negosiasi tersebut dan memimpin dunia menuju era baru kerja sama global tentang perubahan iklim. Selain itu Presiden Barack Obama pada 20 Januari 2015 menyatakan perubahan iklim sebagai "*the greatest threat to future generations and considering that it poses immediate risks to our national security*" atau sebagai suatu ancaman besar yang akan terjadi suatu saat nanti dan apabila Amerika Serikat tidak ikut andil maka akan berdampak pada keamanan nasional. Hingga pada akhirnya Amerika Serikat meratifikasi Perjanjian *Paris Agreement* pada 5 Oktober 2016.¹¹

Namun, hal di atas berbeda dengan yang dilakukan Donald Trump saat terpilih menjadi Presiden baru Amerika pada awal tahun 2017.¹² Pasalnya, Trump malah menginginkan Amerika Serikat untuk menarik diri dari *Paris Agreement*. Selain itu, Donald Trump juga menghapus wacana perubahan iklim dari strategi keamanan nasional.¹³

Paris Agreement adalah suatu rezim perubahan iklim internasional bentukan PBB dan dibawah naungan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang dibentuk pada 12 Desember 2015 dan dinegosiasikan oleh 195 negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. *Paris Agreement* merupakan suatu perjanjian baru dalam upaya internasional untuk mempromosikan mitigasi dan adaptasi iklim dunia.¹⁴ Negara

¹⁰Franziskus von Lucke. *The Securitisation of Climate Change in the United States: The Integration of Climate Threats Into the Security Sector*, Research Associate and PhD Candidate, ClimaSec Project, University of Tübingen(2005):5.

¹¹Alejandra Torres Camprubi. "Securitization of Climate Change: The Inter-Regional Institutional Voyage", *Yearbook of International Environment law*, Vol. 27, No. 1 (2016): 82.

¹²Kevin Liptak and Jim Acosta, "Trump on Paris Accord: "We're getting out"
<https://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html> (Diakses pada 24 Maret 2019).

¹³Julian Borger, "Trump drops climate change from US national security strategy",
<https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/18/trump-drop-climate-change-national-security-strategy>, (Diakses 30 Juni 2019).

¹⁴Miranda A. Schreurs, "The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union," *Bavarian School of Public Policy* (2016): 219-220.

maju maupun berkembang keduanya diharapkan untuk bergabung ke dalam perjanjian untuk melawan perubahan iklim dan mengurangi dampak buruk dari hal yang merupakan masalah bersama tersebut. Negara-negara yang tergabung berupaya mencapai target untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2° C hingga 1,5° C.¹⁵Amerika Serikat merupakan negara penghasil emisi terbesar kedua (17.9%) di dunia setelah Tiongkok (20%), sehingga dengan tergabungnya Amerika Serikat maka akan menyumbangkan banyak emisi dan menstabilkan iklim dunia.¹⁶

Pasal keluarnya Amerika itu dikarenakan bahwa perjanjian tersebut hanyalah sebuah kerjasama yang malah merugikan dan memiskinkan Amerika. Hal ini juga disampaikan Trump dalam pidatonya pada 1 Juni 2017, yang mengatakan *“Compliance with the terms of the Paris Accord and the onerous energy restrictions it has placed on the United States could cost America as much as 2.7 million lost jobs by 2025 according to the National Economic Research Associates.”*¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Amerika sudah melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi isu perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pemikiran Barry Buzan mengenai tiga syarat isu perubahan iklim dianggap telah mencapai *full securitization*, yaitu: pertama, isu perubahan iklim dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi manusia, kedua, hal tersebut diterima oleh mayoritas masyarakat dan yang ketiga diiringi dengan tindakan darurat berupa keluarnya kebijakan, begitu pula sebaliknya dengan *full desecuritization*.¹⁸Sekuritisasi di Amerika terjadi sejak tahun 1960-an hingga akhir kepemimpinan Bill Clinton pada tahun 2001, lalu desekuritisasi terjadi pada pemerintahan George W Bush dari 2001. Tindakan George W Bush ini dinilai sebagai desekuritisasi isu

¹⁵United Nations, *Paris Agreement*, United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris. (2015): 3.

¹⁶VOA Indonesia, “AS beritahu PBB akan keluar dari perjanjian iklim paris”,(2017), <https://www.reuters.com/article/us-china-climatechange-idUSKCN11901W> (Diakses pada 23 Maret 2019).

¹⁷Kevin Liptak and Jim Acosta, “Trump on Paris Accord: “We’re getting out”.

¹⁸Barry Buzan, Ole Waever & Jaap De Wilde, “A Framework for Analysis,” hal 21-30.

perubahan iklim didasarkan pada tulisan Alexander Strandman yang menyatakan kebijakan yang diambil oleh Bush justru berusaha menormalisasi isu perubahan iklim dengan adanya inovasi teknologi rendah emisi dan menentang Protokol Kyoto.¹⁹ Amerika mulai lagi melakukan sekuritisasi pada pemerintahan Barack Obama dengan meratifikasi *Paris Agreement* 2015 serta menjadikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari dokumen rencana keamanan nasional Amerika Serikat pada tahun 2016.²⁰ Kemudian pada pemerintahan Trump kembali terjadi desekuritisasi isu perubahan iklim dibuktikan dengan keluarnya Amerika dari *Paris Agreement* tersebut.

Keputusan Amerika untuk menarik diri dari *Paris Agreement* 2015 yang peneliti asumsikan sebagai tindakan desekuritisasi tersebut menyebabkan banyak pihak yang tidak setuju. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa media sosial Amerika dibanjiri oleh pernyataan para CEO sekelas Mark Zuckerberg (Facebook), Tom Cook (Apple), Lloyd Blankfein (Goldman Sachs), Jeff Immelt (GE), Dion Wesler (HP) dan Sundar Pichai (Google), dimana mereka semua menyayangkan dan bahkan mengutuk keputusan tersebut.²¹

Selain itu dalam survei yang dilakukan “*Harvard School of Public Health & Politic*” pada April lalu mengatakan bahwa 65% warga Amerika ingin tetap ikut dan bergabung dalam kesepakatan iklim ini dan sangat menyayangkan keputusan sepihak yang telah diambil Trump pada Kamis 1 Juni 2017 tersebut.²² Orang Jerman dan pendukung iklim paling penting di Eropa juga sangat kecewa dan mempertanyakan mengapa Amerika Serikat mengambil keputusan

¹⁹Alexander Strandman, “Klimatförändring enligt Bush, Obama, och Trump”, *Ett säkerhetsperspektiv* (2019): 29.

²⁰Joshua William Busby, “Climate Change and US National Security: Sustaining Security Amidst Unsustainability”, (2016): 4.

²¹Geotimes, “Setelah Trump meninggalkan kesepakatan paris”, (2017), <https://geotimes.co.id/kolom/lingkungan/setelah-trump-meninggalkan-kesepakatan-paris/> (Diakses pada 21 Maret 2019).

²²Fabby Tumisa, “Implikasi keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*”, (2017), <https://iesr.or.id/2017/06/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global/> (Diakses pada 21 Maret 2019).

yang memberikan dampak yang lumayan besar bagi perkembangan Perjanjian Iklim selanjutnya.²³Oleh karena itu peneliti beranggapan penting untuk menganalisis bagaimana upaya desekritisasi isu perubahan iklim Amerika Serikat melalui kebijakan penarikan diri dari *Paris Agreement* 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Isu lingkungan adalah salah satu isu penting dalam Hubungan Internasional, salah satunya adalah isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim tersebut juga menjadi perdebatan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Semenjak tahun 1960-an Amerika Serikat melakukan sekritisasi isu perubahan iklim dan menjadi pelopor dalam masalah lingkungan, bisa dilihat sejak pemerintahan Ronald Reagan, George H. W Bush dan Bill Clinton yang peduli dan terbuka pada isu lingkungan. Lalu pada pemerintahan George W Bush Amerika Serikat melakukan desekritisasi yaitu pemerintah meragukan apakah perubahan iklim merupakan hal yang serius, bahkan mereka menganggap bahwa isu perubahan iklim adalah isu yang tidak terlalu mendesak dan ada beberapa isu lain yang lebih penting dibandingkan isu iklim. Setelah itu, isu perubahan iklim kembali menjadi isu penting saat pemerintahan Barack Obama melalui ratifikasi *Paris Agreement* 2015. Hingga baru-baru ini kembali melakukan desekritisasi saat Trump terpilih menjadi kepala pemerintahan Amerika menggantikan Barack Obama.

Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri atau dalam kata lain keluar dari perjanjian tersebut. Sikap Trump tersebut dianggap telah melakukan desekritisasi isu lingkungan terkait keputusannya untuk keluar dari *Paris Agreement* 2015. Maka dari itu penting untuk peneliti melakukan penelitian terhadap bagaimana upaya desekritisasi isu perubahan iklim Amerika Serikat melalui kebijakan penarikan diri dari *Paris Agreement* 2015.

²³Miranda A. Schreurs, "The European Union and the Paris Climate Agreement: moving forward without the United States" (2017):2-3.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah: bagaimana upaya desekuritisasi isu perubahan iklim Amerika Serikat melalui kebijakan penarikan diri dari *Paris Agreement* 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya desekuritisasi isu lingkungan di masa pemerintahan Donald Trump melalui penarikan diri dari *Paris Agreement* 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Perjanjian Perubahan Iklim 2015.
2. Secara praktis menjadi referensi bagi perjanjian atau kerjasama internasional lainnya.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian yang menganalisis kondisi-kondisi serta alasan Amerika bergabung dalam *Paris Agreement* serta keputusan untuk menarik diri setahun sesudah ratifikasi Perjanjian Paris 2015.

Studi pustaka yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Charlotte Streck, Paul Keenlyside, Moritz von Unger yang berjudul "*The Paris Agreement: A New Beginning*".²⁴ Tulisan tersebut membahas tentang *Paris Agreement* serta kemunculannya yang memberikan banyak dampak positif bagi banyak negara dan menciptakan dunia dengan pencapaian standar iklim yang baik. Selain itu, temuannya dalam jurnal ini adalah

²⁴Charlotte Streck, Paul Keenlyside, Moritz von Unger, "The Paris Agreement: A New Beginning" (2016): 3-29.

pengadopsian Perjanjian Paris adalah tonggak penting dalam politik iklim internasional dan mengakhiri negosiasi yang menemui jalan buntu selama bertahun-tahun. Perjanjian ini menciptakan suatu proses dari keterlibatan global, tindak lanjut dan tindakan kerja sama. Tulisan ini membantu peneliti dalam menjelaskan pengertian dan sejarah terbentuknya *Paris Agreement* serta bagaimana pengaruhnya terhadap negara anggota berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan direncanakan demi dunia yang lebih baik lagi.

Studi pustaka yang kedua berupa jurnal yang ditulis Franziskus von Lucke berjudul *The Securitisation of Climate Change in the United States: The Integration of Climate*.²⁵ Tulisan ini membahas bagaimana sekuritisasi isu lingkungan di berbagai negara yang berbeda, misalnya di Amerika Serikat yang mana pada saat itu melakukan sekuritisasi dan menganggap bahwa isu perubahan iklim adalah sesuatu yang bisa menimbulkan ancaman dan perlu upaya lebih untuk melakukan semacam gerakan perubahan atas isu tersebut. Selain itu adanya beberapa perdebatan terkait isu perubahan iklim beserta aktor-aktor yang terlibat. Tulisan ini membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana isu lingkungan tepatnya perubahan iklim sangat diperhatikan pada Amerika dan bagaimana dinamika sekuritisasi yang dilakukan para aktor, disini yaitu Barack Obama dengan berbagai pernyataan yang disampaikannya.

Studi pustaka yang ketiga adalah jurnal dari Alejandra Torres Camprubi yang berjudul *Securitization of Climate Change: The Inter-Regional Institutional Voyage*.²⁶ Tulisan ini membahas mengenai isu perubahan iklim pada masa Barack Obama menjadi salah satu isu penting dan masuk dalam agenda wajib Amerika Serikat. Isu perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi generasi masa depan dan akan menimbulkan ancaman serta resiko besar bagi keamanan nasional. Oleh karena itu Barack Obama sangat peduli dan menginginkan

²⁵Franziskus, von Lucke. "The Securitisation of Climate Change in the United States: The Integration of Climate Threats Into the Security Sector", hal 6.

²⁶Alejandra, Torres Camprubi. "Securitization of Climate Change: The Inter-Regional Institutional Voyage", hal 82-83.

Amerika bergabung dalam *Paris Agreement* 2015. Selain itu juga memberitahu kepada publik bahwa isu lingkungan adalah isu yang memang dianggap biasa namun dampaknya sangat luar biasa apabila tidak diperhatikan dan dikesampingkan. Tulisan ini membantu peneliti dalam memahami bahwa isu perubahan iklim bukanlah isu yang biasa dan kita sebagai masyarakat dunia harus *secure* terhadapnya.

Studi pustaka yang keempat adalah berupa review-an jurnal dari Lene Hansen yang berjudul *Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it*.²⁷ Tulisan ini membahas mengenai sebuah konsep desekuritisasi yang diartikan sebagai suatu perpindahan atau pertukaran dari masalah keamanan menjadi masalah yang bisa diselesaikan dengan normal dan cara biasa. Selain itu jurnal ini juga membahas mengenai beragam penggunaan desekuritisasi melalui empat pembahasan yaitu *Change Through Stabilization, Replacement, Rearticulation and Silencing*, dimana jurnal ini menyumbangkan konsep yaitu empat bagian tadi yang menjadi titik acuan peneliti dalam meneliti permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Dikarenakan konsep pada jurnal ini tepat dan pas untuk dianalisis dengan kasus peneliti saat ini.

Studi pustaka kelima yaitu jurnal dari Miranda Schreurs yang berjudul *"The paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States and The European Union"*.²⁸ Tulisan ini membahas mengenai tiga negara besar seperti Tiongkok, USA dan Eropa yang memberikan atau menjadi negara penyumbang emisi gas terbesar di dunia serta bagaimana peran ketiga negara besar ini dalam memaksimalkan *Paris Agreement*. Selain itu juga mengetahui bahwasanya di tulisan ini berisikan berbagai aturan berbeda yang dilakukan sebuah negara dalam menanggapi *Paris Agreement*. Tulisan ini menyumbangkan data yang

²⁷Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it," *Review of International Studies*: 530.

²⁸Miranda A. Schreurs. "The paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States and The European Union", hal 223.

sangat berguna untuk peneliti, yaitu menemukan bagaimana hubungan serta dinamika negara-negara besar terhadap keberlangsungan serta keberhasilan *Paris Agreement* 2015.

1.7 Kerangka Konseptual

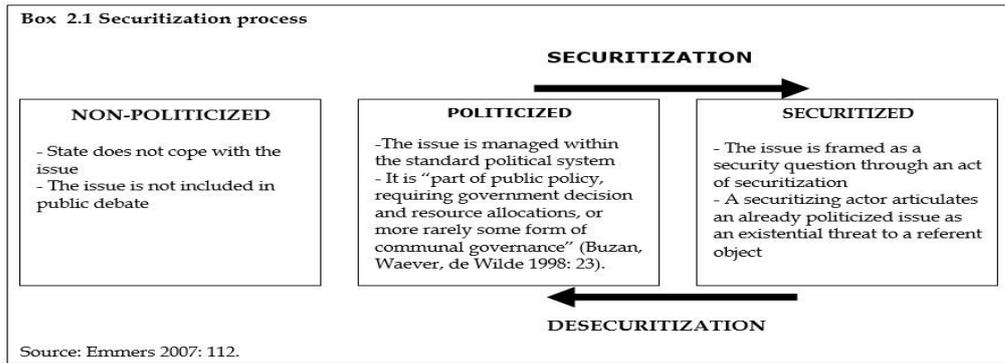
1.7.1 Konsep Keamanan

Dalam studi keamanan Hubungan Internasional terdapat perbedaan dalam memaknai konsep keamanan, yaitu kelompok tradisional yang merupakan pandangan positivis dan kelompok *widerness (copenhagen)* yang merupakan pandangan post-positivis. Kelompok tradisional menganggap bahwa keamanan tradisional berasal dari realis yang mana menurutnya, keamanan sebagai suatu kebebasan dari segala ancaman militer dalam sistem internasional yang anarki.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, negara sebagai aktor dalam dunia internasional hanya memiliki anggapan bahwasanya keamanan tersebut lebih berfokus terhadap bidang militer dan masalah ancaman perang.

Kedua yaitu *widerness* dipelopori oleh Barry Buzan, Lene Hansen, Huysmans dan Ole Waever dari *Copenhagen School*, yang menjelaskan definisi keamanan lebih diperluas, keamanan tidak hanya berbicara mengenai militer saja, tetapi ada isu-isu lainnya yang juga penting dan bisa menimbulkan ancaman keamanan seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.³⁰ Teori keamanan Barry Buzan terdiri dari dua konsep yaitu sekuritisasi dan desekuritisasi, hal ini berarti sebuah ancaman mengalami proses politisasi yang mengakibatkan dia menjadi isu keamanan ataupun sebaliknya. Berikut adalah ilustrasi yang menunjukkan proses sekuritisasi.

²⁹Vladimir Sulovic, "Meaning of Security and Theory of Securitization", *Belgrade Center for Security Policy*, (2016): 2.

³⁰Vladimir Sulovic, "Meaning of Security and Theory of Securitization", hal 2-3.



Gambar 1.1 (Proses Sekuritisasi)

Sumber: Emmers 2001: 112.

1.7.1.1 Sekuritisasi dan Desekuritisasi

Sekuritisasi dan desekuritisasi adalah dua hal yang sama tapi memiliki beberapa perbedaan mendasar. Sekuritisasi adalah proses dimana aktor negara mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan, cara mengubah isu tersebut menjadi masalah keamanan adalah suatu aktor berhasil mengkonstruksi pikiran masyarakat untuk sepaham dengannya.³¹ Maksudnya disini adalah suatu isu menjadi masalah karena ada aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan hal tersebut memang suatu ancaman dan harus segera diselesaikan. Jadi, suatu isu yang dinggap biasa saja bisa terlihat luarbiasa karena adanya konstruksi antar aktor. Berikut disertakan gambar:



Gambar 1.2 (Tahapan Sekuritisasi)

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Selain itu, sekuritisasi adalah perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk mengubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan, seperti migran, masalah lingkungan dan

³¹Barry Buzan, Ole Waever & Jaap De Wilde, "A Framework for Analysis," hal 31-33.

sebagainya.³²Bisa disimpulkan bahwa sekuritisasi adalah dimana aktor-aktor penting berhasil mengkonstruksi pikiran serta keinginan masyarakat dan khalayak banyak mengenai suatu isu yang awalnya terlihat biasa saja, namun menjadi isu penting dan mengharuskan banyak pihak untuk ikut ambil tindakan demi menyelesaikan permasalahan pada isu tersebut.

Konsep desekuritisasi sangat bertolak belakang dengan sekuritisasi, dimana desekuritisasi menggambarkan suatu isu tidak menjadi masalah keamanan dan tidak akan menjadi ancaman bagi kedaulatan serta integritas negara dan bisa ditangani dengan cara normal.³³ Hansen menambahkan bahwa desekuritisasi itu adalah adanya suatu pertukaran atau perpindahan isu-isu keluar dari bidang keamanan, termasuk lingkungan.³⁴Jadi, desekuritisasi adalah suatu proses dimana isu-isu keamanan diubah menjadi non-keamanan. Isu-isu seperti lingkungan, migran dan keamanan non tradisional lainnya termasuk dalam isu yang masih bisa diselesaikan dengan jalur normal. Selain itu, aktor-aktor dalam desekuritisasi juga akan mengkonstruksi publik bahwa isu-isu tersebut tidak akan mengancam kedaulatan negara.

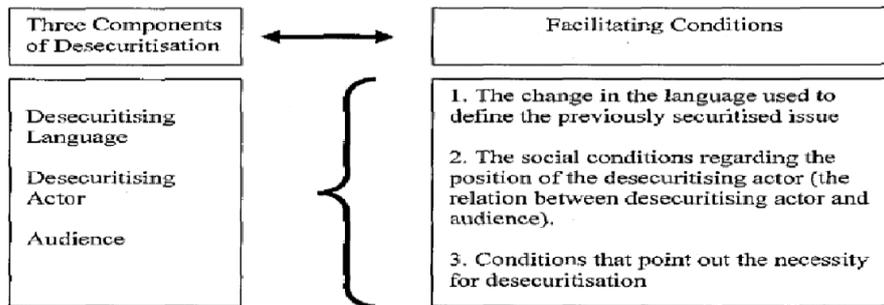
Meskipun di dalam Copenhagen School tidak secara eksplisit menjelaskan elemen dari sebuah desekuritisasi, Bezer Coskun membuat bagan dari sebuah desekuritisasi dengan menyimpulkan pengamatannya terhadap analisis keamanan dalam pendekatan tersebut.

³²Barry Buzan & Lene Hansen, "The Evolution of International Studies, NYC: Cambridge University Press,"(2009):21,

³³Barry Buzan & Lene Hansen, " The Evolution of International Studies, NYC: Cambridge University Press, hal 21-22.

³⁴Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it," *Review of International Studies*: 525.

Hasilnya, Coskun melihat :



Gambar 1.3 Elemen utama dalam sebuah desekuritisasi

Sumber: Besen Coskun (2009) Hlm.24

Didalam kondisi yang memfasilitasi sebuah desekuritisasi, terdapat tiga komponen dari sebuah desekuritisasi, yaitu *Desecuritizing Language*, *Desecuritizing Actor*, dan *Audience*. Ketiga komponen ini merupakan hal pokok yang terdapat didalam proses desekuritisasi. Didalam teori desekuritisasi, tiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan satu komponen dengan yang lainnya karena memiliki pengaruh yang begitu kuat sehingga saling mempengaruhi. Pengaruh yang diberikan oleh komponen tersebut membentuk proses desekuritisasi sehingga dapat terjadi. Desecuritizing language berisikan *speech-act* yang dilakukan oleh aktor desekuritisasi untuk meyakinkan publiknya (yaitu *Audience* berdasarkan analisis sekuritisasi) dengan *desecuritizing language* milik mereka.

Selanjutnya Hansen membagi 4 bentuk desekuritisasi yang membahas mengenai bagaimana suatu isu bisa dikatakan dan dikelompokkan ke dalam desekuritisasi, Hansen menyebutnya dengan *Applying Desecuritisation: Four Political Forms*. Empat hal inilah yang

nantinya akan menjadi konsep atau acuan penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

1.7.1.2 *Applying Desecuritisation: Four Political Forms*

Kali ini Hansen membagi bentuk desekritisasi menjadi empat bagian, dimana kesemuanya menggambarkan bagaimana sebuah desekritisasi tersebut bisa bekerja dengan baik. Empat bentuk desekritisasi oleh Hansen ini bukan menjelaskan bagian mana yang unggul dari bagian lainnya, tetapi lebih kepada bagaimana penerapannya ke dalam suatu isu yang dianggap masuk dalam kategori desekritisasi. Empat bentuk desekritisasi yang dimaksudkan Hansen adalah *Change Through Stabilisation, Replacement, Rearticulation* dan *Silencing*.

1. *Change Through Stabilization*³⁵

Bagian ini berkaitan dengan konsep *De'tente* seperti yang dijelaskan Waeyer dalam "Securitisation & Desecuritisation". Dimana *De'tente* adalah pengurangan hubungan ketegangan, atau pelonggaran dari sebuah isu dan situasi politik suatu negara. Untuk lebih jelasnya, *Change Through Stabilisation* adalah suatu isu yang dianggap sebagai sebuah ancaman yang sudah stabil dan tidak akan berpotensi berbahaya.

2. *Replacement* (Mengganti isu)³⁶

Replacement adalah dimana adanya suatu kasus atau isu yang sebagian ter-sekritisasi sementara kasus lainnya diabaikan, dalam kata lain tidak lagi berada dalam lingkup keamanan. *Replacement* biasanya terjadi dikarenakan identitas serta dinamika sebuah negara yang selalu berubah.

³⁵Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it", hal 538.

³⁶Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it", hal 540.

3. *Rearticulation*³⁷

Rearticulation adalah suatu isu yang sudah diganti tadi, akhirnya melalui tahapan reartikulasi, dimana mengacu pada keyakinan bahwa suatu isu yang dianggap keluar dari keamanan dan tidak akan berpotensi bahaya diberikan solusi melalui sikap, tindakan dan pernyataan dari aktor-aktor yang terlibat bahwa isu tersebut sudah diatasi dan memang tidak akan menjadi ancaman. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang.

4. *Silencing*³⁸

Selanjutnya yang terakhir adalah *Silencing*. *Silencing* adalah dimana suatu masalah yang sudah melalui tahapan *replacement* serta reartikulasi diatas, maka para aktor penting dan sebagainya akan memilih untuk diam dan membungkam, sehingga diam mereka inilah yang akhirnya disimpulkan mengenai sebuah desekuritisasi.

Tabel 1.1 (Indikator Desekuritisasi)

No	Desecuritization Outcomes	Indicators
1	Change Through Stabilization	Explicit change in the security discourse
2	Replacement	One issue is excluded and another is securitized
3	Rearticulation	Offering political solution to the threat and addressing the source of conflict
4	Silencing	An issue disappears or fails to register in a security discourse

Sumber: Hansen 2011: 15-21

Keempat bentuk diatas akan menjadi acuan peneliti dalam menganalisis bagaimana bentukupaya Amerika Serikat melakukan desekuritisasi isu perubahan iklim melalui keputusannya untuk keluar dari *Paris Agreement* 2015.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

³⁷Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it", hal 541.

³⁸Lene Hansen, "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it", hal 543.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dimana berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna atau data, bukan perluasan data. Disamping itu, metode kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan interpersonal melalui angka atau data statistik.³⁹ Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang ada dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan pidato-pidato yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penting dalam penelitian ini yang membahas tentang desekuritisasi isu lingkungan yang dilakukan Amerika Serikat melalui keputusan untuk menarik diri dari *Paris Agreement* 2015.

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian berjenis deskriptif analisis yaitu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai perubahan atau *setting social*, selain itu untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, mengklarifikasikan subjek penelitian, serta menyimpan informasi kontradiktif mengenai subjek penelitian.⁴⁰ Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menjelaskan dinamika keinginan Amerika untuk keluar dari Perjanjian Paris 2015 sementara Amerika mendapat ancaman ketidaksetujuan dari domestik dan internasionalnya, selain itu bagaimana desekuritisasi isu lingkungan di Amerika Serikat melalui keputusan menarik diri dari *Paris Agreement* 2015.

1.8.2 Batasan Penelitian

³⁹Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Makara, Sosial Humaniora," *Universitas Indonesia* 9, No. 2, (2005): hal 57-65.

⁴⁰Lembaga Penelitian Mahasiswa PENALARAN, "Penelitian Deskriptif", Universitas Negeri Makassar (2018) Diakses melalui <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html> (Diakses 15 mei 2019).

Batasan waktu penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dari tahun 2015 hingga 2017. Tahun 2015 dimana pada saat itu Amerika berkomitmen dan telah meratifikasi *Paris Agreement* serta menyetujui segala aturannya, tetapi pada 2017 dibawah pemerintahan Trump, Amerika menarik diri dari perjanjian tersebut dengan alasan tidak adilnya aturan dalam Perjanjian Paris tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau bisa disebut sebagai variabel dependen, merupakan objek yang akan dianalisis atau dijelaskan dalam sebuah penelitian.⁴¹ Berdasarkan penelitian “bagaimana desekuritisasi isu lingkungan di Amerika Serikat melalui keputusan menarik diri dari *Paris Agreement* 2015” maka, unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Amerika Serikat.

Tingkat analisis atau level analisis merupakan acuan posisi dari unit yang akan diteliti.⁴² Menurut Mochtar Mas’oed, tingkat atau level analisis dibagi menjadi lima yaitu individu (menganalisis perilakudari tokoh individu yang mempengaruhi suatu keputusan melalui persepsi, kepribadian atau tingkah laku, seperti presiden dan kepala pemerintahan); kelompok (menganalisis perilaku kelompok di dalam Hubungan Internasional, seperti organisasi internasional); negara-bangsa (menganalisis tentang interaksi dan dinamika proses pembuatan keputusan suatu negara di dalam hubungan internasional); pengelompokan negara-negara atau regional (menganalisis adanya interaksi antar-negara yang berupa aliansi, persekutuan perdagangan, dan lain-lain), dan sistem internasional (menganalisis suatu fenomena atau dinamika perilaku aktor di dalam sistem internasional, seperti hukum internasional).⁴³ Maka level analisis dalam penelitian ini adalah negara.

⁴¹Laura Roselle dan Sharon Spray, “Research and Writing in International Relations”, (London: Longman Pearson, 2008), hal 11-12.

⁴²Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi”, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1990), hal 35-286.

⁴³Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi”, hal 35-286.

Unit eksplanatif dari penelitian ini adalah kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement 2015*. Hal ini dikarenakan desekuritisasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit-unit analisa yang akan digunakan. Penelitian yang berjudul “Desekuritisasi Isu Lingkungan di Amerika Serikat melalui Keputusan Menarik Diri dari *Paris Agreement 2015*” menggunakan level analisis atau tingkat analisis yaitu negara. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus kepada analisis dari perilaku suatu negara yaitu analisis tindakan dari Amerika Serikat yang memilih untuk melakukan desekuritisasi melalui keputusannya untuk menarik diri dari Perjanjian Paris 2015.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data*; yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.⁴⁴ Adapun cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan mencari data-data melalui studi kepustakaan (*literature review*); seperti buku dari Barry Buzan yang berjudul *A Framework for Analysis*, jurnal-jurnal seperti yang ditulis oleh Vladimir Sulovic yang berjudul *Meaning of Security and Theory of Securitization*, selain itu dari Lene Hansen yang berjudul *Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it*, Miranda A. Schreurs yang berjudul *The European Union and the Paris Climate Agreement: moving forward without the United States* dan *The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union*. Selain itu data-data dari *media outlet* dan situs web resmi Amerika Serikat, arsip pemerintahan maupun laporan penelitian yang terkait dengan Amerika dan *Paris Agreement* seperti (Time, New York Time, The Guardian dan sebagainya) juga menjadi

⁴⁴Harnovinsah, Metodologi Penelitian: Modul 3 (Universitas Mercu Buana), hal 1.

sumber dari bukti upaya pemerintahan Donald Trump melakukan desekuritisasi isu perubahan iklim melalui *speech-act* dan kebijakannya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting dikarenakan dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan dan pengkategorian dan menjadi data terkait dan data kurang terkait. Kegiatan klasifikasi dilakukan setelah proses editing dan pemampatan data.⁴⁵

Berdasarkan hal diatas, penulis hanya melakukan analisis data melalui data terkait dikarenakan data-data yang dikumpulkan oleh penulis memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun dalam melakukan analisis data, penulis menggambarkan komitmen Amerika Serikat untuk bergabung dalam *Paris Agreement* 2015 hingga pada akhirnya keluar dari perjanjian tersebut dan melakukan desekuritisasi isu perubahan iklim. Sedangkan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, penulis menganalisis upaya desekuritisasi isu perubahan iklim yang dilakukan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Trump menggunakan konsep desekuritisasi oleh Barry Buzan dan Lene Hansen. Berikut beberapa poin analisis data yang disederhanakan oleh penulis:

1. Mengumpulkan data dan fakta terkait isu lingkungan *Paris Agreement* 2015 di Amerika Serikat.

⁴⁵P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik", Jakarta : P.T Rineka Cipta, (2011): hal 104-106.

2. Mengolah serta menganalisis permasalahan dengan empat indikator yang ada pada konsep desekuritisasi oleh Lene Hansen. (*Change through stabilisation, replacement, rearticulation and silencing*).

1. *Change Through Stabilisation*

Disini peneliti fokus pada bagaimana suatu isu lingkungan dianggap sudah stabil dan tidak akan berpotensi berbahaya.

2. *Replacement*

Disini peneliti membahas isu lingkungan yang awalnya *secure* tetapi diganti dan dipindahkan ke lingkup desekuritisasi.

3. *Rearticulation*

Pada tahapan ini peneliti fokus pada ancaman yang diganti tadi kemudian diberikan solusi berupa pernyataan bahwa isu lingkungan tersebut sudah diatasi dan memang tidak akan mempengaruhi atau bahkan mengancam sebuah negara.

4. *Silencing*

Pada bagian *silencing* peneliti memfokuskan pada aktor-aktor dari sebuah isu tadi yang pada akhirnya memilih untuk diam dan tidak lagi membicarakan terkait isu tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara menyeluruh dan terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II ISU PERUBAHAN IKLIM DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai *Paris Agreement* dan bagaimana aturan-aturan didalamnya serta apa saja fakta yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat berkomitmen dan akhirnya meratifikasi perjanjian tersebut.

BAB III KEPUTUSAN TRUMP MENGENAI KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI *PARIS AGREEMENT* 2015 SERTA RESPON DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai bagaimana Amerika Serikat pada akhirnya memilih jalan untuk menarik diri dari perjanjian iklim dunia serta bagaimana respon masyarakat dunia baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV ANALISIS DESEKURITISASI ISU PERUBAHAN IKLIM AMERIKA SERIKAT MELALUI KEBIJAKAN PENARIKAN DIRI DARI *PARIS AGREEMENT* 2015

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai apa tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat pada keputusan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris serta bagaimana desekuritisasi isu lingkungan di Amerika Serikat melalui keputusan menarik diri dari *Paris Agreement* 2015 tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang akan mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini dan memberikan garis besar terhadap kontribusi apa yang dapat diberikan terhadap lingkungan akademis maupun pemangku kepentingan.